

DOKTRIN TNI ANGKATAN LAUT EKA SASANA JAYA

Edy Prasetyono

1. Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya merupakan landasan bagi pelaksanaan tugas AL yang berdasarkan istilahnya dipakai sebagai penuntun ke arah keunggulan Angkatan Laut di medan perang. Selain itu, doktrin ini memberi inspirasi yang visionary tentang perlunya kekuatan dan kemampuan maritime serta Angkatan Laut yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, kuat, dan disegani di dunia.
2. Doktrin Eka Sasana Jaya menjelaskan beberapa hal dasar sebagai berikut: a. lingkungan laut dan sifat dasar kekuatan laut; b. perang dan konflik bersenjata; c. konsepsi pertahanan negara di laut; d. kekuatan dan kemampuan maritime; e. gambaran tentang bagaimana Angkatan Laut memberikan kontribusinya kepada pertahanan negara.
3. Penjelasan tentang lingkungan laut dan sifat dasar kekuatan laut beranjak dari konsepsi geostrategis dan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mengandung beberapa konsekuensi baik ekonomi, politik, hukum, militer, dan fisik yang harus dilindungi. Sebagai negara kepulauan terbesar dan dimensi maritime yang terbuka maka aspek/konsekuensi ekonomi, politik, hukum, militer, dan fisik yang harus dilindungi menuntut suatu pengembangan kekuatan laut yang mampu memanfaatkan dan mengeksplotasi sifat laut diatas. Karena itulah kekuatan maritime dipandang strategis dan mempunyai akses yang lebih besar baik secara fisik maupun politik; lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi.
4. Beranjak dari pemahaman tentang kekuatan dan kemampuan maritime di atas, doktrin Eka Sasana Jaya kemudian menjelaskan konsepsi Perang dan Konflik Bersenjata, Secara khusus doktrin ini menyatakan bahwa karena sifat khas laut, peperangan di laut bersifat lebih terbuka, bergerak secara bebas yang menuntut manuver lebih tinggi, medan tempur tidak statis, bias berubah secara cepat. Karena sifatnya pula, perang laut lebih banyak diikat oleh tidak hanya hukum humaniter internasional, melainkan juga oleh rezim hukum laut internasional seperti ditentukan dalam UNCLOS yang mengandung aspek kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Indonesia.
5. Sebagai negara kepulauan dengan luas laut yang yang menjadi tanggung jawab Indonesia sekitar 5.8 juta km persegi, maka wajar laut mempunyai makna penting. Secara politik laut melahirkan konsepsi tentang persatuan tidak hanya ke dalam, melainkan juga ke luar sebagaimana telah diakui oleh UNCLOS/1982. Laut juga menjadi media perhubungan (termasuk perdagangan) yang sangat vital. Kecenderungan ke depan justru akan menunjukkan makin pentingnya jalur-jalur perhubungan dan perdagangan laut sejalan dengan proses globalisasi. Laut juga mempunyai arti ekonomi yang besar karena kandungan sumber-sumber alamnya. Dengan nilai-nilai penting laut itu dan pengalaman sejarah, serta lingkungan strategis dan geografis, maka laut akan menjadi elemen penting bagi pertahanan

Indonesia baik secara konsepsi dan cara pandang pertahanan (geopolitik dan geostrategis), perumusan kebijakan pertahanan, maupun kepentingan nasional yang harus dilindungi, terutama kepentingan nasional di dan lewat laut yaitu: keamanan di perairan wilayah yurisdiksi Indonesia; keamanan GPL dan ALKI; keamanan sumber alam di laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawasan strategis yang berbatasan dengan negara tetangga; keamanan ZEE; dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut.

6. Pandangan dan konsepsi tentang laut yang mempengaruhi kebijakan pertahanan dan kepentingan nasional di dan lewat laut membentuk fungsi dan peran Angkatan Laut yaitu peran militer (pertahanan negara dan penangkalan), peran polisionil; peran dukungan diplomasi; dan peran lain (MOOTW). Tetapi yang penting dalam doktrin ini adalah peran dan fungsi Angkatan Laut tersebut kemudian diterapkan dalam perlindungan kawasan-kawasan yang dianggap vital dari perspektif geopolitik dan geostrategis Indonesia yaitu SLOC, SLOT, GPL, dan ALKI.
7. Untuk itulah doktrin ini menegaskan perlunya pembangunan kekuatan dan kemampuan maritime dan secara khusus perlunya pembangunan kekuatan Angkatan Laut dengan focus pada: kemampuan pertahanan laut; kemampuan keamanan laut; kemampuan intelijen maritime; kemampuan angkutan laut militer; kemampuan survei; dsb. Semua itu ditujukan untuk tugas-tugas baik perang (dengan tugas penguasaan, pengendalian, dan penangkalan) maupun non perang.
8. Doktrin Angkatan Laut secara garis sudah sangat komprehensif baik dilihat dari konsepsi geopolitik dan geostrategis yang mendasari maupun secara operasional yang dijabarkan dalam berbagai bentuk kepentingan nasional nasional di laut dan perlunya pembangunan kemampuan angkatan laut untuk memperjuangkan kepentingan nasional tersebut.
9. Yang menjadi persoalan adalah komitmen politik untuk memberikan prioritas dalam kebijakan pertahanan dan pembangunan kekuatan militer yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anggaran.